



Yogya Segera Miliki BPBD

■ Yulianingsih

Meski setiap tahun Yogyakarta langganan terserang banjir lahar dingin, namun hingga 2012 ini kota ini belum memiliki badan khusus yang menangani bencana tersebut.

Awal tahun depan namanya Kota Yogyakarta segera memiliki badan khusus itu. Pasalnya, saat ini Panitia Khusus (Pansus) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DPRD Kota Yogyakarta telah mencapai kesepakatan dengan Pemkot setempat tentang finalisasi draf Raperda Pembentukan Susunan Kedudukan dan Tata Kerja BPBD.

Dipastikan, Raperda BPBD tersebut dapat disahkan tahun ini, sehingga penanganan bencana bisa menjadi lebih optimal.

Menurut anggota Pansus Antonius Foki Ardianto, kesepakatan dan finalisasi draf Raperda BPBD tersebut diharapkan segera dibawa ke rapat paripurna pada Senin

(19/11) mendatang. Dengan begitu, kata dia, akhir tahun ini Pemkot telah memiliki badan khusus yang menanggulangi kebencanaan.

Diharapkan dengan adanya badan itu penanganan bencana di Kota Yogya bisa dilakukan secara komprehensif.

"Sesuai dengan Peraturan Kepala (Perka) BNPB No 3/2008 tentang pedoman pembentukan BPBD, maka dalam Perda ini juga disepakati bahwa Sekda Kota Yogyakarta menjadi Kepala BPBD," jelasnya, Selasa (13/11).

Menurutnya, isi terpenting dari draf Raperda tersebut adalah fungsi penanggulangan kebakaran dan perlindungan masyarakat masuk dalam fungsi penanggulangan bencana yang menjadi ikon dari BPBD ini.

Dengan disepakatinya draf Raperda tersebut, maka Perda No 10/2008 tentang Satuan Kedudukan dan Tugas Pokok Ketenagakerjaan Pasal 2 angka 8, Bab IX pasal 23, 24 dan 25 tentang ketentuan yang mengatur mengenai fungsi penanggu-

langan kebakaran bencana dan perlindungan masyarakat pada kantor PKB Linmas dicabut.

Pengesahan Raperda BPBD itu, sambung dia, berkonsekuensi pada pengesahan APBD 2013 harus bisa dilaksanakan mulai 1 Januari 2013. "Kalau tidak, maka masyarakat terancam tidak punya anggaran dalam hal kebencanaan, kebakaran dan Linmas," jelasnya.

Menurut rencana, sesuai rapat Bamus, pada 14 November akan ada uji publik Perda BPBD tersebut, sebelum diratifikasi pada 19 November untuk menjadi Perda. Perda ini inisiatif DPRD sendiri.

Terpisah Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogya, Aman Yuriadijaya, mengatakan kesepakatan menyangkut tipe BPBD yang disepakati dengan tipe A. Oleh karena itu, beban kerja BPBD juga lebih luas menyangkut bencana kebakaran serta dikepalai oleh Sekda sebagai *exofficio* Ketua BPBD Yogyakarta.

Hanya saja, untuk ketua pelaksanaannya tetap setara dengan kepala dinas atau pejabat eselon II B. Aman berharap dengan kesepakatan ini, per Januari 2013 BPBD sudah bisa terbentuk dan langsung melakukan kegiatan.

"Kantor Penanggulangan Kebakaran Bencana dan Perlindungan Masyarakat (KPK B-Linmas) akan terintegrasi ke dalam BPBD," jelasnya.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2.			
3. Kantor Penanggulangan Kebakara			

Yogyakarta, 17 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005